



# Macet Masih Jadi Persoalan

## Evaluasi, Dewan Minta Pemkot Jogja Cari Solusi

**JOGJA** - Kemacetan dan parkir ilegal masih menjadi sorotan selama libur akhir tahun lalu di Kota Jogja. Karena itu DPRD Kota Jogja akan memanggil jajaran Pemkot Jogja untuk menjelaskan dan melakukan evaluasi bersama supaya tidak terulang terus tiap liburan.

"Selalu terulang, tiap liburan pasti ada laporan wisatawan yang di-tuhuk rego dan macet, kami akan minta penjelasan dan solusi seperti apa," ujar Wakil Ketua DPRD Kota Jogja M. Ali Fahmi di DPRD Kota Jogja, kemarin (2/1).

Menurut Fahmi, meski masih dipadati wisatawan saat liburan lalu, tapi jika macet dan perilaku negatif pelaku pariwisata di Kota Jogja belum hilang, dikhawatirkan wisatawan tidak kembali berwisata ke Jogja.

Untuk kemacetan, Fahmi menyroti pusat keramaian yang masih teruju di Malioboro. Rekayasa lalu lintas di seputar kawasan Malioboro dinilai belum efektif memecah kemacetan. Untuk itu Fahmi menagih janji pengembangan pusat keramaian baru Kota Jogja di luar Malioboro.

"Kalau semua tujuan ke Malioboro pasti macet, makanya perlu dibuat pusat keramaian baru di luar Malioboro," ungkapnya.

Politikus PAN itu juga mengingatkan tentang perilaku menaikkan harga yang dilakukan pedagang

maupun juru parkir. Meski saat libur akhir tahun lalu tidak terdapat laporan PKL yang *nuthuk rego*, tapi perilaku juru parkir (*jukir*) yang menerapkan tarif parkir di atas aturan masih banyak ditemukan. Fahmi meminta supaya Pemkot Jogja tegas menerapkan sanksi bagi para pelanggar. "Beri sanksi paling berat supaya ada efek jera, masak tiap liburan pasti terulang," katanya.

Terpisah, Plt Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Jogja Imanudin Azis mengaku selama libur akhir tahun ini sudah menjangkir sembilan juru parkir di Kota Jogja yang melakukan pelanggaran. Mereka terdiri dari satu pengelola taman khusus parkir (TKP) swasta, enam juru parkir tepi jalan umum (TJU) ilegal, dan dua *jukir* legal yang menerapkan tarif di atas ketentuan.

"Yang terakhir kami razia tahun baru lalu di Jalan KHA Dahlan mepet Gedung Agung, daerah larangan parkir tapi pasang tarif Rp20 ribu, dan di Gembira Loka Zoo parkir Rp15 ribu," ungkapnya.

Dari sembilan *jukir* yang terjaring operasi gabungan Dishub Kota Jogja bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja itu semuanya akan diajukan ke Pengadilan Negeri Kota Jogja untuk menjalani sidang tindak pidana ringan (Tipiring). "Satu *jukir* sudah disidang 29 Desember lalu, lainnya rencananya 8 Januari nanti," ujarnya.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malioboro Syarif Teguh Prabowo menambahkan di kawasan Malioboro sudah tidak ditemu-

kan lagi PKL nakal yang menaikkan tarif seandainya. Sebab, sejak jauh hari UPT Malioboro sudah mengingatkan setiap pelanggaran akan ditindak tegas, hingga pencabutan izin berjualan. Hal itu sudah dilakukan pada lesehan Intan pada saat libur Lebaran lalu.

Sementara itu terkait taks online, penerbitan surat keputusan (SK) Gubernur DIJ terkait angkutan sewa khusus tidak dalam trayek tampaknya masih kabur. Meski begitu, Pemprov DIJ secara perlahan akan menerapkan aturan tersebut dan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 108/2017 tentang Penyelenggaraan Angkuta Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

Kepala Dinas Perhubungan DIJ Sigit Sapto Raharjo menyatakan, kuota taks *online* yang akan diterapkan di DIJ sebanyak 496 kendaraan. Jumlah tersebut, jelasnya, bukan mengacu kepada SK Gubernur DIJ, melainkan berdasarkan Permenhub 108/2017. "Itungan itu acuannya pada PM (peraturan menteri)," kata Sigit kemarin (2/1).

Dia mengungkapkan, Gubernur DIJ Hamengku Buwono X, kerap menanyakan keberadaan pengelola taks *online* yang sudah mendaftarkan angkutanannya. Karena belum adanya titik temu, gubernur sebutnya, meminta kepada Dishub untuk mengadakan pertemuan dengan pengelola taks *online* untuk mencari solusi.

"Kami undang mereka (peng-

elola) minggu ini untuk mengetahui kebutuhannya berapa. Kami akan berkoordinasi dengan pengurus," jelas pejabat yang sebelumnya menjabat sebagai kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIJ.

Sigit mengatakan perlu ada kesepakatan dengan pengelola taks *online* berkaitan dengan penerapan kuota tersebut. Pihaknya pun berencana mengajak Organda DIJ agar kebijakan tersebut dapat dijalankan oleh semua pihak.

Selain itu, tambahna, Dishub berencana menggelar operasi taks *online* sebagai bentuk penerapan kebijakan Permenhub 108/2017. Dalam razia itu akan dilibatkan aparat kepolisian sebagai institusi yang menegakkan aturan tersebut. "Sifatnya sekadar pembinaan dulu," jelasnya.

Humas Paguyuban Pengemudi Onilne Jogja (PPOJ) Nurhadi menyatakan pengurus PPOJ, secara tegas menolak keberadaan Permenhub 108/2017. Penolakan tersebut, jelasnya, sudah disampaikan dalam aksi demo yang digelar di Gedung DPRD DIJ beberapa waktu lalu.

"Kami menolak. Termasuk keberadaan kuota bagi *driver online*," kata Nurhadi kepada *Radar Jogja*.

Sebagai pengurus PPOJ, pihaknya tidak pernah mendapatkan informasi dari pemerintah terkait adanya sosialisasi pembatasan kuota taks *online* di Jogja. Termasuk juga, sosialisasi dalam pengurusan perizinan mengenai taks *online*. (*pra/bhn/ila/er*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. UPT. Malioboro			

Yogyakarta, 27 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005